



IMPLEMENTASI ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM MENGHADAPI MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

THE APPLICATION OF ADAPTIVE GOVERNANCE IN AGAINTS THE COVID-19 PANDEMIC, A CASE STUDY OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF DIY

Adib Muhammad Razwan¹, Argo Pambudi²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 23-01-23

Diperbaiki 13-02-23

Disetujui 24-02-23

Kata Kunci:

Adaptif Governance, Covid-19, Kota Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *adaptive governance* dalam menghadapi dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 studi kasus Pemerintah Kota Yogyakarta, penelitian ini menggunakan desain dekriptif kualitatif. Peneliti menggunakan metode tersebut karena dianggap lebih tepat dalam mengetahui sejauh mana implementasi *adaptive governance* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menghadapi masa pandemic Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Biro Tata PemerintahanSetda DIY, BAPPEDA DIY dan Inspektorat Kota Yogyakarta. Dalam menganalisis data terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerapan *adaptive governance* di Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat terlaksana secara optimal. Masalah lambatnya kebijakan yang dikeluarkan guna penanggulangan pandemi Covid-19, serta masih kurangnya kapasitas SDM yang berdampak pada lambatnya penanganan serta koordinasi yang dinilai belum efektif dan efisien, hal tersebut menjadikan faktor penghambat dari kurang optimalnya implementasi kebijakan tersebut.

ABSTRACT

Keywords:

Adaptive Governance, Covid-19, Yogyakarta City

This study aims to determine the implementation of adaptive governance in the face of the Covid-19 pandemic period case study of the Yogyakarta City Government, this study uses a qualitative descriptive design. Researchers use this method because it is considered more appropriate in knowing the extent of the implementation of adaptive governance by the Yogyakarta City Government in facing the Covid-19 pandemic. This research was carried out at the Bureau of Governance, BAPPEDA DIY and the Yogyakarta City Inspectorate. In analyzing data, it consists of the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the adaptive governance implementation policy in the Yogyakarta City Government has not been implemented optimally. The problem of slow policies issued to overcome the Covid-19 pandemic, as well as the lack of human resources capacity which has an impact on the slow handling and coordination that is considered ineffective and efficient, this makes it an obstacle factor to the suboptimal implementation of these policies.

1. Pendahuluan

Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik mulai banyak dipraktikan di level daerah. Implementasi *adaptive governance* dalam menghadapi masa pandemi covid-19 merupakan proses inovasi penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi *adaptive governance* dalam menghadapi masa pandemi covid-19 hadir untuk bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah cepat dalam penanganan masalah pandemi covid-19. Salah satu bentuk adaptasi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penanggulangan Covid-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Dalam bencana alam seperti ini implementasi kebijakan *adaptive governance* sangatlah dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan dalam berbagai sektor. Hal ini dikarenakan *adaptive governance* memiliki kesempatan guna melihat keadaan dalam berbagai sektor pengendalian yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan strategis mitigasi Covid-19 diantaranya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Tindakan responsif dan inovatif pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan mengatasi pandemi Covid-19 kadang dirasa masih tidak efektif menekan penyebaran Covid-19, tata regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat acap kali terlambat dan belum mampu mengatasi masalah pandemi yang dibutuhkan masyarakat (Aulawi, 2020).

Pemerintah daerah menjadi relevan untuk melakukan invasi kebijakan penanganan Covid-19 karena memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan kesehatan kesehatan dan keselamatan rakyat dimasa pandemi ini. Masalah yang muncul di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah lambatnya penanganan atas dampak pandemi yang khususnya terjadi di Kota Yogyakarta. Peran implementasi kebijakan *adaptif governance* sangat berpengaruh untuk menanggulangi masalah yang ada dengan cara mengeluarkan kebijakan serta aturan-aturan baru (Pratiwi, 2021).

2. Metode Penelitian

2.1. Desain Penelitian

Desain atau jenis penelitian yang telah digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2015: 15) penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Moleong (2012:4) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari beberapa orang-orang yang dapat diamati. Desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh terkait proses implementasi *adaptive governance* dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 dengan studi kasus Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2022 hingga 1 November 2022.

2.3. Subjek Penelitian

Menurut Moleong (2014: 132), Subjek penelitian atau yang dikenal sebagai informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek dalam penelitian ini meliputi:

1. Ibu Sekar Rachmadiillah Larasati selaku Analis Kebijakan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
2. Bapak Chandra Budi Santoso selaku Analis Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Bapak Topaz Mardiarso selaku Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.4. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 203), instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lebih lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pemeran utama dalam melakukan analisis data berupa pedoman wawancara serta pedoman observasi. Selain berperan sebagai instrumen penelitian utama, peneliti juga menggunakan instrument pendukung untuk mempermudah dalam pengumpulan data yaitu pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam, dan dokumen dari instansi terkait.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan karena teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2018:231). Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak terstruktur. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data-data yang lengkap dan menyeluruh. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara melalui *video conference* dengan beberapa aplikasi sosial media dikarenakan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Tujuan metode wawancara ini untuk memperoleh data yang konkret tentang dinamika konflik implimentasi *Adaptif Governance* dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015:240). Dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan dan mempelajari data yang diperlukan dan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan bahan penelitian. Selain itu, peneliti juga mengambil gambar serta mendapatkan dokumen pada saat wawancara dilakukan mengenai implementasi *adaptive governance* menghadapi masa pandemi Covid-19 dengan studi kasus Pemprov DIY.

3. Observasi

Menurut John W. Creswell (2018: 256) observasi merupakan cara mengumpulkan data dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu atau kelompok di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi bertujuan untuk mengetahui dan mencatat tentang implementasi *adaptive governance* menghadapi masa pandemi Covid-19 dengan studi kasus Pemprov DIY. Observasi ini dilakukan dengan cara melihat langsung bagaimana implementasi *adaptive governance* yang dilakukan oleh Pemprov DIY dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

2.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk mengukur tingkat kredibilitas penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2018:241) triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan dan membandingkan dari sumber data yang diperoleh. Hal itu dapat dicapai dengan beberapa cara, antara lain: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2012). Dengan menggunakan jenis triangulasi sumber, peneliti telah mencoba membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber untuk memeriksa 50 kebenaran data dan informasi yang diperoleh sebagai pembanding sehingga menghasilkan data yang valid.

2.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dari Miles dan Hurbeman (1984). Data yang telah diperoleh diklasifikasikan, dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipilih berdasarkan kategori kemudian dapat diperoleh kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data-data yang dimaksud ialah data-data yang sudah terkumpul dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan

yang berisi pengalaman peneliti tentang apa yang dilihat, dirasakan, dan ditemukan pada saat penelitian. Data-data tersebut terkait implementasi *adaptive governance* dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 dengan studi kasus Pemprov DIY.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono 2018:247). Dalam penelitian ini, data yang telah didapat dari lapangan dan berbagai nasasumber berkaitan dengan implementasi *adaptive governance* dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 dengan studi kasus pemprov DIY telah dipilih dan disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Langkah selanjutnya data-data yang diperoleh kemudian direduksi dan dikelompokkan kedalam tiap permasalahan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan beberapa informasi yang telah diperoleh kedalam suatu bentuk yang rapih. Penyajian data dilakukan guna mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara menyeluruh dan bagian-bagian tertentu dari data. Data tersebut dikelompokkan dalam bentuk tertentu seperti table, grafik, atau gambar sehingga telah terlihat suatu gambaran yang lebih menyeluruh. Kemudian data-data tersebut disusun sesuai kategori yang sejenis agar dapat ditampilkan selaras dengan masalah yang dihadapi.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi data harus dilakukan secara terus menerus sejalan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Setelah data diolah menjadi suatu informasi dan menghubungkannya dengan teori menjadi suatu data yang sistematis, langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Data-data yang telah direduksi dan dikategorikan selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir sehingga mampu menjawab semua permasalahan yang sedang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Kebijakan Adaptive Governance dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid-19

Peneliti menganalisis mengenai Implementasi *Adaptive Governance* dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid-19 menggunakan teori Subarsono (2016:93), yang terdiri dari dua variable yaitu isi kebijakan dan konteks atau lingkungan kebijakan. Variabel isi kebijakan terdiri dari 6 indikator dan variabel konteks penerapan kebijakan terdiri dari 3 indikator.

1. Isi Kebijakan

Variabel isi kebijakan meliputi 6 sub variabel, diantaranya kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang digunakan. Pemerintah Kota Yogyakarta beserta beberapa satuan OPD yang terlibat melakukan penerapan *Adaptive Governance* dalam pelaksanaan suatu rangkaian kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan. Adanya implementasi *Adaptive Governamce* yang

diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi titik terang atas musibah Pandemi Covid-19 dan dapat memulihkan kembali sektor-sektor yang terdampak oleh Pandemi Covid-19. Selain itu juga implementasi *Adaptive Governance* dipengaruhi oleh kepentingan rancangan kegiatan yang diadakan setiap 5 tahun sekali agar anggaran memenuhi target. Para *stakeholders* membantu melaksanakan kebijakan penerapan *Adaptive Governance*. Dengan demikian, maka kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi *Adaptive Governance* dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19 melalui beberapa OPD yang terkait.

2. Manfaat dalam Penerapan *Adaptive Governance* dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid-19 dengan Studi kasus Pemprov DIY

Grindle (1980) dalam Leo Agustino (2016:143) menjelaskan dalam suatu kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari adanya kebijakan. Jika manfaat dari implementasi *Adaptive Governance* ini dirasa kurang jelas dan tidak sesuai dengan kebutuhan maka ada yang salah dari penerapan kebijakan ini.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai instrumen untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di Kota Yogyakarta. Implementasi *Adaptive Governance* dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19 ini memiliki manfaat untuk masyarakat dalam aspek kesehatan dan juga infrastruktur penunjang penanganan masa pandemi Covid-19.

3. Perubahan yang ingin dicapai dalam Implementasi *Adaptive Governance* dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid-19 dengan Studi Kasus Pemprov DIY

Merilee S Grindle (2016:142) mendefinisikan bahwa perubahan yang ingin dicapai adalah sejauh mana perubahan yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan yang harus mempunyai skala yang jelas. Implementasi *Adaptive Governance* dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19 menginginkan penerapan kebijakan ini agar hasil kebijakan bisa lebih optimal dan peningkatan resiko dari Pandemi Covid-19 dapat diminimalisir. Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pemberi layanan kebijakan kurang adaptif dalam pengambilan keputusan, hal ini dapat dilihat dari masalah yang terjadi dengan melihat daya tanggap pemerintah yang dinilai lambat dalam menangani masalah pandemi Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan pun terbilang cukup lama dalam melihat situasi yang ada dilapangan.

4. Kedudukan Setiap *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan *Adaptive Governance*

Setiap *stakeholders* yang berperan dalam kebijakan penerapan *Adaptive Governance* memiliki kedudukannya masing-masing dalam suatu keadaan. Letak peran serta *stakeholders* dalam implementasi *Adaptive Governance* ini adalah membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dimiliki. Setiap OPD yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi *Adaptive Governance* ini memiliki program-programnya masing-masing yang sudah disesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dari pihak Pemprov DIY pengambilan keputusan dalam implementasi *Adaptive Governance* ini sangatlah kompak, koordinasi yang dilakukan dengan sistem online terasa lebih efektif dan dapat memantau kinerja yang sudah dilaksanakan. Melalui slogan “Tan Mingkuh

Tumapak ing Jaman Anyar” yang berarti pantang mundur, penuh semangat memasuki era adaptasi kebiasaan baru, Pemerintah Kota Yogyakarta mengajak seluruh elemen masyarakat agar pantang mundur menghadapi tantangan yang ada, khususnya pandemi Covid-19.

5. Pelaksana Program Implementasi Kebijakan *Adaptive Governance* dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid-19

Pelaksanaan program merupakan para aktor-aktor yang terlibat langsung dalam suatu penerapan kebijakan. Suatu program kebijakan yang sudah ditentukan harus diikuti oleh para *stakeholders* yang saling bersinergi dan mengerti tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pada implementasi *Adaptive Governance* dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19 ini para *stakeholders* yang terlibat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 yang terdiri dari Biro Tata Pemerintahan, BAPPEDA, dan Inspektorat.

6. Sumber daya yang digunakan dalam Implementasi Kebijakan *Adaptive Governance* dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid-19

Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya yang dilibatkan meliputi sumber daya manusia untuk melihat dan menerapkan kebijakan yang telah dibuat. Pada implementasi *Adaptive Governance* dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19, sumber daya manusia yang dimiliki cukup terbatas. Namun disisi lain, sistem koordinasi yang diterapkan oleh Biro Tata Pemerintahan terlihat lebih efisien dan lebih efektif untuk implementasi *Adaptive Governance*.

7. Konteks implementasi kebijakan

Variabel konteks penerapan kebijakan meliputi 3 indikator, diantaranya tingkat kepatuhan dan daya tanggap, kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, dan karakteristik lembaga dan penguasa.

8. Karakteristik Lembaga dan Penguasa dalam Implementasi Kebijakan *Adaptive Governance* dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19.

Leo agustino (2016:144) mendefinisikan lingkungan tempat kebijakan dilakukan juga berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pada bagian ini menjelaskan karakteristik dari suatu lembaga akan mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan. Pada implementasi *Adaptive Governance* dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19 ini, masing-masing pelaksana atau OPD pada dasarnya memiliki karakteristik dan sifat yang sama. Kesamaan ini dilihat dari landasan hukum yang dijadikan dasar. Masing-masing OPD saling mendukung dan berkoordinasi sehingga kerja sama antar OPD dapat berjalan dengan baik. Tidak ada tumpang tindih penguasa yang diberikan dan juga tidak ada OPD yang saling menjatuhkan satu sama lain menjadikan implementor dapat memahami kebijakan dengan baik.

9. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Pada indikator ini menjelaskan seberapa besar kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu program kebijakan, (Leo Agustino, 2016:145). Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan dapat terlihat dari pertanggungjawaban dari setiap pelaksana kebijakan. Pada kebijakan ini bentuk

pertanggungjawaban yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing OPD. Seperti yang terjadi pada BAPPEDA Kota Yogyakarta, mereka bertanggung jawab terhadap proses penanggulangan Covid-19 dengan membuat infrastruktur guna menekan penyebaran virus tersebut di setiap titik yang ada di kawasan Malioboro dan juga beberapa titik yang ada di Kota Yogyakarta. Setiap OPD yang melaksanakan kebijakan sudah patuh terhadap peraturan yang ada tetapi disini masih terdapat dualisme regulasi karena masing-masing OPD juga punya peraturannya sendiri sehingga penerapan kebijakan Adaptive Governance belum berjalan begitu maksimal.

10. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan *Adaptive Governance* dalam Menghadapi masa Pandemi Covid-19

Merilee S. Grindle (2016:142) menjelaskan bahwa kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor untuk mempermudah jalannya suatu penerapan kebijakan. Strategi yang diterapkan oleh pelaksana kebijakan dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19 adalah penanganan yang cepat dan tepat dengan memberdayakan ahli. Setiap OPD yang terlibat dalam kebijakan harus melaksanakan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Para OPD dapat berkoordinasi dengan Pemprov DIY dalam upaya melakukan penegakan terhadap penerapan Adaptive Governance dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19. Selain itu, tiap OPD juga dapat berkoordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan pada saat melakukan tindakan teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun untuk strategi yang digunakan para *stakeholders* dalam implementasi kebijakan *Adaptive Governance* adalah melakukan penanganan yang tepat dan cepat sehingga tepat sasaran serta memberdayakan sumberdaya yang ahli dalam bidang tugas masing-masing.

11. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan *Adaptive Governance* dalam Menghadapi masa Pandemi Covid-19.

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam penerapan kebijakan ini meliputi kejelasan kebijakan serta koordinasi yang berjalan dengan baik. Kejelasan kebijakan menjadikan suatu kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat. Penerapan kebijakan tersebut memiliki peraturan yang jelas yang mengatur tentang kebijakan *Adaptive Governance*, peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025.

Faktor pendukung berikutnya yaitu koordinasi yang terjalin dengan baik. Dalam penerapan kebijakan ini, para OPD yang terlibat sudah berkoordinasi dengan baik. Para OPD telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahpahaman hal teknis. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jaringan sinyal yang kurang stabil. Hal ini sering kali terjadi saat melakukan rapat ataupun koordinasi secara daring hal ini yang membuat riskan melakukan kesalahan saat menjalankan rapat koordinasi guna menerapkan kebijakan *Adaptive Governance* dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Kebijakan Adaptive Governance dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid-19 dengan Studi kasus Pemprov DIY belum berjalan optimal. Dilihat dari sumber daya manusia yang belum mampu melihat perkembangan teknologi yang dimana dapat membantu koordinasi dimasa pandemi seperti saat ini, dan juga adanya kendala jaringan sinyal provider yang timbul tenggelam sehingga menghambat koordinasi di setiap pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel penerapan kebijakan oleh Merilee S Grindle (1980) yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel tersebut terdiri dari variabel isi kebijakan dan variabel konteks penerapan kebijakan.

Dari variabel isi kebijakan, pelaksanaan penerapan kebijakan Adaptive Governance dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19 masih berjalan cukup baik dapat dilihat dari indikator sumber daya yang digunakan yaitu sumber daya manusia untuk melakukan penerapan Adaptive Governance masih cukup baik, hal ini karena adanya generasi muda yang melek akan perkembangan teknologi sehingga dapat membantu bagaimana koordinasi yang dapat dilakukan secara daring atau online.

Dari variabel konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari indikator tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Peneliti melihat bahwa kedisiplinan dari penyelenggara penerapan kebijakan, dapat dilihat dari bagaimana eksekusi dari para OPD untuk bagaimana menanggulangi masalah pandemi ini agar dapat segera selesai. ini sudah sadar akan bagaimana cara penanggulangan tanggap darurat Covid-19. Dengan demikian eksekusi untuk penanggulangan tanggap darurat Covid-19 dapat berjalan dengan apa yang telah diharapkan. Kesadaran dari penyelenggara penerapan Adaptive Governance ini sudah baik sehingga untuk kedepannya hanya dibutuhkan konsistensi untuk bagaimana selanjutnya konsistensi ini dapat dipertahankan.

Faktor pendukung penerapan Adaptive Governance dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19 dengan studi kasus Pemprov DIY ini terdiri dari peraturan yang jelas terkait penerapan kebijakan Adaptive Governance, koordinasi antar OPD yang terjalin dengan baik. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari adanya sumber daya manusia yang belum memahami cara kerja software dalam era digital ini, Faktor pendukung berikutnya yaitu koordinasi yang terjalin dengan baik. Dalam penerapan kebijakan ini, para OPD yang terlibat sudah berkoordinasi dengan baik. Para OPD telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahpahaman hal teknis. Pihak Biro Tata Pemerintahan Setda DIY selalu memperbaharui informasi melalui grup whatsapp yang beranggotakan OPD terkait. Dengan begitu, jika suatu saat terdapat hal penting yang menyangkut tentang dengan teknis penerapan kebijakan bisa langsung dilaporkan dalam grup whatsapp tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masih perlu penambahan personel untuk tanggap darurat bencana Covid-19 dengan bekerjasama lebih lagi dengan berbagai OPD yang mendapatkan wewenang untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

2. Belum adanya peraturan yang mengatur untuk bagaimana menghadapi bencana darurat pandemi Covid-19
3. Perlunya ditingkatkan komitmen dari semua OPD dalam melakukan penanggulangan tanggap bencana darurat Covid-19.
4. Perlunya sumber daya manusia baru yang paham akan situasi dan kondisi.
5. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan untuk masyarakat agar dapat menanggulangi masalah pandemi.

Referensi

- [1] Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [2] Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [3] Aulawi, A. (2020). Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110-132.
- [4] Creswell, John. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, London: SAGE Publications
- [5] Grindle, Merilee S. 2007. Good Enough Governance Revisited. *Jurnal Development Policy Review*, 25 (5), 2007, hal. 553-574.
- [6] Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.s
- [7] Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT
- [8] Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37-52.
- [9] Subarsono, M.Si.,MA. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi*. Cetakan VII. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [10] Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Daellenbach, Hans G., McNickle, Donald C., *Management science, Decision making through systems thinking*, Palgrave Macmilan, 2005.